

MAHASISWA DAN NILAI UNIVERSAL DEMOKRASI: PELUANG DAN TANTANGAN DALAM MENGHADAPI *THREE EASY PATHS TO REGRESSION*

(Students and The Universal Value of Democracy: Opportunities and Challenges in Facing Three Easy Paths to Regression)

Elkristi Ferdinan Manuel

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

elkristi.manuel@upnvj.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 21 Maret 2025

Disetujui 25 Mei 2025

Publikasi Mei 2025

Keywords :

Mahasiswa dan Demokrasi, *Three Easy Path to Regression*, Nilai Universal Demokrasi.

Abstract

*This research aims to contribute to readers and scientists about how important and impactful the role of students is in the vortex of democracy in Indonesia. In addition, this study also guides in facing democratic challenges, as stated by Charles Taylor, namely, *Three Easy Paths to Regression*. This is where the urgency of this research can illustrate how the role of law and students can deal with the *Three Easy Paths to Regression* comprehensively. To answer this big theme, in this study, the author uses normative juridical research methods through a legislative approach, a historical approach, and a conceptual approach, with the limitations of applicable laws and regulations in Indonesia regarding the role of students and democracy. Through these approaches and restrictions, the topic of discussion in this study shows that student movements from time to time have different characteristics, but prove that student movements have an impact on the progress of democracy. On the other hand, in facing the *Three Easy Paths to Regression*, students can act as a driver of dialogue and critical discussion on campus. Students can form public spaces that are deliberate, this guarantee is protected by law. In addition, students can also play a role in promoting inclusivity and diversity. Finally, students need to develop critical and analytical thinking, where the ability to think critically is an important tool in dealing with complex challenges in society.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi para pembaca dan ilmu pengetahuan mengenai betapa penting dan berdampaknya peran mahasiswa dalam pusaran demokrasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan petunjuk dalam menghadapi tantangan demokrasi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Charles Taylor, yaitu *Three Easy Pats to Regression*. Disinilah urgensi penelitian ini yang dapat menggambarkan bagaimana peran hukum dan mahasiswa dapat menghadapi *Three Easy Pats to Regression* secara komprehensif. Untuk menjawab tema besar tersebut, dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual dengan batasan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai peran mahasiswa dan demokrasi. Melalui pendekatan dan pembatasan tersebut, topik pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa dari masa ke masa ternyata memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun membuktikan bahwa pergerakan mahasiswa berdampak kepada kemajuan demokrasi. Disi lain, dalam menghadapi *Three Easy Paths to Regression* mahasiswa dapat berperan sebagai penggerak dialog dan diskusi kritis di kampus. Mahasiswa dapat membentuk ruang-ruang publik yang musyawarah, jaminan ini dilindungi oleh hukum. Sekanjutnya, mahasiswa juga dapat berperan dalam mempromosikan inklusivitas dan keberagaman. Terakhir, mahasiswa perlu mengembangkan pemikiran kritis dan analitis, di mana kemampuan untuk berpikir kritis adalah alat penting dalam menghadapi tantangan kompleks di masyarakat.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2025 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : 10.46601/juridicaugr.v6i2.412

A. PENDAHULUAN

Mahasiswa sebagai *agent of change* memiliki peranan yang sangat vital dalam transformasi sosial serta pandangan politik di masyarakat. Everett M. Rogers menyampaikan pandangannya melalui teori agent perubahan (*change agent theory*) yang menyatakan bahwa seorang individu maupun kelompok masyarakat berperan dalam penyebaran ide-ide baru yang dapat mendorong perubahan sosial menjadi lebih baik.¹ Selain itu, Jurgen Habermas melalui teori kritisnya menekankan pentingnya ruang publik (*public spah*), dimana ruang publik dapat di jadikan wahana diskusi yang kritis di tengah masyarakat.² Selain sebagai agen perubahan (*agent of changes*), mahasiswa juga memiliki beberapa fungsi lainnya, seperti penjaga nilai (*iron stock*), kontrol sosial (*social control*), penggerak pembaharuan moral masyarakat (*moral force*), penjaga nilai-nilai luhur seperti musyawarah mufakat, pancasila, gotong royong (*guardian of value*). Peran tersebut berdampak kepada demokrasi, di mana Robert A. Dahl menerangkan bahwa demokrasi merupakan sistem politik dimana sistem tersebut haruslah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengambil Keputusan.³ Joseph Schumpter misalnya, menjelaskan bahwa demokrasi merupakan sebuah metode institusional yang bertujuan memberikan keputusan

politik kepada seseorang yang terpilih melalui proses pemilu. Terlepas daripada itu, demokrasi itu sendiri merupakan sebuah konsep yang tetap hidup dan bukan hanya terbatas pada pemilu saja, tetapi demokrasi merupakan nilai universal yang diterapkan oleh seluruh bangsa yang dicirikan melalui tiga pandangan hidup. Pertama, hakikat kehidupan manusia (*intrinsic importance in human life*) dimana warga negara berpartisipasi dalam kebebasan politik sebagai manusia seutuhnya dalam kehidupan (*human life*) yang bebas. Kedua, demokrasi merupakan peran pembantu untuk menggerakkan politik (*instrumental role in generating political incentives*) dimana pemerintah harus selalu terbuka dalam kewajiban pemerintahannya akibat dari kehidupan manusia yang bebas, serta pemerintah wajib melindungi masyarakat dari penindasan. Ketiga, demokrasi memiliki fungsi untuk membentuk nilai (*constructive function in the formulation of values*), dimana lewat konsep demokrasi bangsa-bangsa dapat membentuk nilai.⁴ Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, nampaklah bahwa peran mahasiswa sangatlah penting dalam pemilu dan bahkan setelah pemilu berakhir, karena selain sebagai agen perubahan, mahasiswa juga memiliki peran-peran lain yang tak kalah pentingnya dalam menjaga demokrasi sebagai nilai yang universal yaitu sebagai hakikat hidup manusia seutuhnya, pelindung masyarakat, dan pembentuk nilai.

¹ Everett M. Rogers, *Diffusion of Innovations* (New York: Free Press, 2003). hlm. 11-25.

² Jürgen. Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere*, trans. Thomas Burger (The MIT Press, 1991). hlm. 35.

³ Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics* (New Haven: Yale University Press, 1989). hlm. 35.

⁴ Amartya Kumar Sen, "Democracy as a Universal Value", *Journal of Democracy*, Vol. 10, No. 3, 1999. hlm. 3-17.

Freedom House dalam laporannya tahun 2023 mengidentifikasi gambaran yang cukup mengkhawatirkan selama 17 tahun terakhir,⁵ di beberapa benua telah terjadi kemunduran demokrasi yang signifikan dengan terciptanya kudeta, pemerintah yang otoriter, partisipasi yang menurun.⁶ Terhadap kemunduran demokrasi tersebut, Charles Taylor memberikan analisisnya dan mengidentifikasinya yaitu, pertama, penurunan kualitas institusi demokrasi. Kedua, munculnya populisme dan otoritarianisme, dimana munculnya "pemimpin populis" yang menggunakan retorika anti-establishment untuk mendapatkan dukungan dan mengabaikan norma demokrasi. Ketiga, meningkatnya polarisasi masyarakat, dimana semakin terpisahnya kelompok-kelompok politik dan sosial serta timbulnya sikap antagonis.⁷ Polarisasi ini diperburuk dengan disinformasi dan propaganda, dimana dialog dan kompromi menjadi sangat sulit. Ditengah pesimisme tersebut, Larry Diamond memberikan pencerahan melalui peran mahasiswa sebagai masyarakat madani untuk menjaga keseimbangan antara idealisme demokratis dan realitas politik yang dinamis. Keterlibatan mereka dalam gerakan sosial, media digital, dan diskusi publik mencerminkan bagaimana nilai-nilai demokrasi terus diuji dan

dimaknai ulang.⁸ Selain itu, nilai-nilai universal dalam demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi publik haruslah tetap dijaga bukan hanya soal mekanisme pemerintahan dalam demokrasi, disinilah peran mahasiswa menjadi sangat penting.⁹ Di berbagai negara, termasuk Indonesia, mahasiswa telah membuktikan diri sebagai garda terdepan dalam menjaga nilai universal dalam demokrasi,¹⁰ di mana mahasiswa mampu berfikir kritis dan inovatif dalam menyampaikan aspirasi politik, sebagaimana studi yang menunjukkan bahwa negara dengan partisipasi mahasiswa yang tinggi cenderung memiliki kualitas demokrasi yang stabil.¹¹ Untuk itu penelitian ini sangat lah relevan untuk di kaji, dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam mengadopsi dan mempertahankan nilai-nilai universal demokrasi dalam konteks *Three Easy Paths to Regression*, serta dapat memberikan kontribusi pada literatur ilmiah tentang peran mahasiswa dalam proses demokratisasi di Indonesia dan menawarkan rekomendasi bagaimana gerakan dan arah perjuangan yang relevan.

⁵ Freedom House, *Freedom in The World 2023: Marking 50 Years in the Struggle for Democracy* (Washington: Freedom House, 2023). hlm. 15-19.

⁶ *Ibid.*

⁷ Charles Taylor, *Democratic Degeneration: Three Easy Paths to Regression* (Chicago: University of Chicago, 2018). hlm. 24-30.

⁸ Larry Diamond, *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World* (New York: Times Books, 2008). hlm. 102.

⁹ Robert A. Dahl, *On Democracy* (New Haven & London: Yale University Press, 1998). hlm. 35.

¹⁰ Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman, "Pernyataan Sikap PPI Jerman; Tuntutan Pelajar Indonesia Di Jerman Atas Kerusakan Sistematis Negara Dan Krisis Multidimensional Di Indonesia" (Koln, Germany, 2025). hlm. 1

¹¹ Pippa Norris, *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011). hlm. 87.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif¹² dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*).¹³ Data yang diperoleh dalam penelitian ini di dapat dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan demokrasi dan peran mahasiswa sebagai bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur hukum. Selain itu, penulis menganalisa data secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis hingga menarik kesimpulan dan saran untuk menjawab peluang dan tantangan dalam nilai-nilai universal demokrasi dalam pandangan *three easy path to regression*.

C. PEMBAHASAN

1. Peluang dan Tantangan Bagi Mahasiswa dan Nilai Universal Demokrasi

Konsep nilai universal dalam demokrasi merupakan hak semua warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Konstitusi). Konstitusi memandang bahwa warga negara dan penduduk berhak atas penghidupan yang layak dan merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya.¹⁴

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi dilindungi tanpa intervensi apapun.¹⁵ Selain itu, konsep universal seperti kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi publik haruslah dilindungi sebagaimana amanat konstitusi.¹⁶ Di sinilah peluang besar bagi mahasiswa untuk berkontribusi aktif melalui demonstrasi, diskusi publik, dan partisipasi lainnya, bukan justru dihalang-halangi oleh pihak yang berkuasa.¹⁷ Dalam pelaksanaan peluang tersebut, mahasiswa sering dihadapkan dengan ancaman, represi, dan kriminalisasi. Laporan Amnesty Internasional misalnya, mencatat setidaknya 300 mahasiswa mengalami kriminalisasi ketika menyampaikan aspirasi dalam aksi demonstrasi.¹⁸ Catatan ini menunjukkan adanya kontradiksi antara perlindungan hukum dengan fakta di lapangan yang menguji demokrasi.

Selain tantangan eksternal berupa represi dan kriminalisasi tersebut, mahasiswa menghadapi tantangan internal berupa apatisme politik di kalangan mahasiswa. Bambang Nugroho mencatat sebesar 60 persen mahasiswa Indonesia berpendapat bahwa politik terlalu rumit dan tidak relevan dan mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.¹⁹ Di sisi lain, peluang bagi mahasiswa dalam demokrasi tentunya

¹² A'an Efendi & Dyah Octorina Susanti, Penelitian Hukum (Legal Research) (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014). hlm. 11.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). hlm. 47.

¹⁴ Lihat Pasal 27 ayat (2) Konstitusi.

¹⁵ Lihat Pasal 19 DUHAM.

¹⁶ Lihat Pasal 28 F, 28 H dalam Konstitusi.

¹⁷ Lihat Pasal 28 E ayat (3) Konstitusi.

¹⁸ Amnesty International, "Annual Report 2020/2021: The State of the World's Human Rights" (London, 2021). hlm. 45.

¹⁹ Bambang Nugroho, Partisipasi Politik Generasi Muda Di Era Digital (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). hlm. 112.

tetap terbuka, dimana mahasiswa yang memiliki kemampuan dalam teknologi digital dapat memanfaatkan platform digital untuk menyuarakan dan membentuk opini publik.

a. Mahasiswa dan Pemilu

Demokrasi jangan hanya dimaknai ketika pemilu saja, tetapi ada yang lebih krusial yaitu legitimasi sosiologis, ketimbang legitimasi prosedural dalam demokrasi yang terbatas pada pemilu, dimana ruh dalam demokrasi itu sendiri adalah partisipasi masyarakat.²⁰ Surbakti menilai bahwa pemilu merupakan jalan, bukan tujuan dalam demokrasi.²¹ Upaya nyata dalam pemilu adalah menguatkan partisipasi dan pemberdayaan terhadap mahasiswa melalui karakteristik akademis sebagai literasi, bukan dari bilik suara.²²

Dalam demokrasi elektoral misalnya, Konstitusi menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat²³, dimana sebagai generasi muda yang aktif secara intelektual, mahasiswa bukan hanya sebagai pemilih, namun penggerak kesadaran publik dan *agent of change* dengan daya kritis dan idealismenya yang mampu mengawasi proses demokrasi. Selain itu, mahasiswa dapat berpartisipasi lewat Lembaga

pemantau pemilu, seperti Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).²⁴ Peran mahasiswa dalam pemilu juga disyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu dimana setiap warga negara memiliki hak untuk partisipasi dan pengawasan dalam pemilu. Mahasiswa sering terlibat dalam pemantauan praktik politik uang, pelanggaran kampanye, dan kecurangan pemungutan suara.²⁵ Saat ini, mahasiswa dapat berpartisipasi aktif lewat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melalui kegiatan kompus dan kolaborasi dengan Bawaslu. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui diskusi publik, seminar, dan pelatihan khusus yang dapat membantu meningkatkan kesadaran politik.²⁶ Peran aktif ini merupakan peluang besar bagi mahasiswa untuk turut berperan aktif dalam demokrasi dan pemilu, walaupun masih terdapat mahasiswa yang ikut dalam pengawasan ini masih menghadapi tekanan dari pihak-pihak tertentu.²⁷

b. Peran Mahasiswa dalam Demokrasi Sepanjang Sejarah

²⁰ Mahi M. Hkikmat, "Urgensi Partisipasi Gerakan Sosial Mahasiswa Dalam Peningkatan Kualitas Pemilu 2024," *Jurnal Keadilan Pemilu* Vol. 1, No. 1 (2021). Hlm. 5.

²¹ Ramlan Surbakti, *Perekayasaan Sistem Pemilu: Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis* (Jakarta: Jakarta Harper Perennial, 2008). hlm. 5-10.

²² Mahi M. Hkikmat, "Urgensi Partisipasi Gerakan Sosial Mahasiswa Dalam Peningkatan Kualitas Pemilu 2024," *Jurnal Keadilan Pemilu* 1, no. 1 (2021). Hlm. 5.

²³ Pasal 1 ayat (2) Konstitusi

²⁴ Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), "Laporan Pemantauan Pemilu 2019" (Jakarta, 2019). Hlm. 30.

²⁵ Lihat Pasal 448, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

²⁶ Lihat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

²⁷ Asian Network for Free Elections (ANFREL), "Election Observation Report: Challenges and Threats in Southeast Asia" (Bangkok, 2021). hlm 67.

Gerakan mahasiswa pada masa Orde Lama (1945-1966) di Indonesia adalah salah satu bab penting dalam sejarah politik negara kita. Pada periode ini, Indonesia mengalami ketidakstabilan yang cukup tinggi. Di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno, pemerintah berusaha menggabungkan berbagai ideologi, seperti nasionalisme, sosialisme, dan Islam. Namun, upaya ini sering kali menimbulkan ketegangan di dalam masyarakat. Dalam situasi yang penuh tantangan ini, mahasiswa mulai menyadari bahwa mereka memiliki peran penting sebagai agen perubahan sosial dan politik.²⁸ Mereka merasa terpenggil untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Mahasiswa pada masa itu aktif terlibat dalam berbagai organisasi, seperti Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan lain sebagainya. Salah satu momen yang paling berkesan adalah demonstrasi besar-besaran pada tahun 1966, di mana mahasiswa turun ke jalan menuntut pengunduran diri Sukarno dan perubahan kebijakan pemerintah.²⁹ Keterlibatan mahasiswa dalam politik praktis juga menjadi ciri khas gerakan ini. Mereka tidak hanya berperan sebagai pengkritik, tetapi juga berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah dan mendorong reformasi melalui dialog dan advokasi. Dengan kekuatan kolektif yang

mereka miliki, mahasiswa berupaya menciptakan kesadaran politik di kalangan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam proses politik.³⁰ Secara keseluruhan, gerakan mahasiswa pada masa Orde Lama memainkan peran yang sangat penting yaitu menjadi suara kritis yang menuntut perubahan dan reformasi.³¹

Pada masa orde baru memiliki karakteristik tersendiri, dimana setelah peristiwa Gerakan 01 Oktober 1965 (Gestok), gerakan mahasiswa penuh warna dan tantangan. Kebijakan demi kebijakan dari pemerintah yang berkarakteristik represif semakin membatasi kebebasan mahasiswa. Lukman Hakim misalnya, merasakan bagaimana pemerintahan orde baru yang begitu represif melalui kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK) sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk menenagkan gerakan mahasiswa. Selain itu, kebijakan ini merupakan salah satu strategi menciptakan teknostruktur, dimana kaum teknokrat dijadikan alat untuk menopang struktur kekuasaan.³² Memasuki pertengahan tahun 1970-an, semangat gerakan mahasiswa kembali bangkit, terutama setelah peristiwa MALARI (Malapetaka Lima Belas Januari) pada tahun 1974. Aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa menuntut penolakan terhadap investasi asing dan kebijakan ekonomi yang

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Bob Sugeng Hadiwinata, "Democracy and Civil Society in Indonesia: The Role of Students in the Reform Movement," *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* Vol. 3, No. 1 (2004): hlm. 45-60.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Lihat Pleodi Lukman Hakim (Ketua Dema UI) pada tahun 1978 dalam aksi penolakan NKK/BKK. hlm. 50-56.

dianggap merugikan rakyat.³³ Selanjutnya, pada pemilu 1977, mahasiswa mulai mengkritik pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden dan menuntut pelaksanaan pemilu yang lebih demokratis³⁴ Salah satu momen penting adalah peluncuran Buku Putih Perjuangan Mahasiswa pada tahun 1978, yang berisi pemikiran kritis mengenai pembangunan dan kebijakan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa meskipun dalam situasi sulit, mahasiswa tetap berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dan keadilan sosial.³⁵ Pada masa orde baru ini, posisi mahasiswa adalah sebagai oposisi pemerintah, dan berhasil menggusur pemerintahan orde baru tahun 1998.³⁶ Secara keseluruhan, gerakan mahasiswa pada masa Orde Baru mencerminkan perjuangan yang kompleks antara aspirasi untuk perubahan sosial dan penekanan dari pemerintah, seperti penculikan, pembubaran diskusi, dan lain sebagainya.³⁷

Pada era reformasi, terdapat perubahan pergerakan yang cukup drastis secara karakteristik, mahasiswa kini berfokus pada permasalahan HAM, demokrasi, dan transparansi. Alat pergerakan pun bergeser dengan menggunakan media komunikasi dan teknologi untuk menyebarkan informasi

dan mobilisasi pergerakan. Pada pola seperti ini, mahasiswa bukan hanya sebagai pengawas jalannya pemerintahan, tetapi menjadi penggerak dalam menciptakan ruang-ruang publik yang inklusif.³⁸ Selain itu, pola gerakan era reformasi hingga saat ini berbeda dengan era sebelumnya yang mencirikan serangan fisik terhadap mahasiswa dan pembungkaman kebebasan berpendapat. Saat ini pola tersebut berubah ke media sosial yang menjadi ruang publik yang luas.

2. Demokrasi dan *Three Easy Paths to Regression*

Berbeda dengan para pakar lainnya, Charles Taylor mengkritik pandangan umum yang menyatakan bahwa sejarah bergerak secara otomatis menuju tatanan yang demokratis. Taylor mengkritik bahwa demokrasi tidak dalam jalur kemajuan, melainkan krisis yang sangat serius, yaitu kemunduran atau kemerosotan, di mana dalam hal ini demokrasi kehilangan kualitasnya.³⁹ Dalam pandangannya, rakyat di bedakan menjadi dua, pertama yang dikatakan sebagai rakyat adalah keseluruhan populasi yaitu seluruh warga negara. Kedua, rakyat sebagai non-elit yang sering terpinggirkan dalam proses politik.⁴⁰ Demokrasi kehilangan kualitasnya berdasarkan tiga parameter, yaitu pertama demokrasi kehilangan ruhanya jika dikendalikan oleh elit atau peran partisipasi non-elit berkurang dan kehilangan peranan. Demokrasi dalam pandangan "*demos*" dan

³³ Yusuf Budi Prasetya, Irfan Ahmad Fauzi, Rahayu Hardita Dwi Widyanti, "Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Baru 1974-1978: Dari MALARI Hingga NKK/BKK," *Jurnal Chronologia* 4, no. 3 (2023). hlm. 140-153.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Elis Mardianti, "Gerakan Mahasiswa Dalam Pusaran Tiga Orde Kekuasaan: Antara Gerakan Moralitas Atau Gerakan Politis," *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan* 2, no. 2 (2022). hlm. 97.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Mohammad Maiwan, *Loc. Cit.* hlm. 45.

³⁹ Charles Taylor, "The Challenge of Regressive Democracy" (McGill University Beatty Memorial Lecture, October 12, 2017). hlm. 1-2.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 4

"*cratos*" bukanlah dimaknai dengan seluruh rakyat, namun kekuatan non-elit ini.⁴¹ Demokrasi dalam parameter pertama ini dapat dimaknai dengan dua konsep. Satu sisi, ketika hukum menempatkan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, bukan aristokrat, oligarki, maupun diktator. Di sisi lain, pengertian demokrasi memunculkan pertanyaan apakah kaum non-elit memiliki peranan dan kekuasaan yang sama dengan jumlah mereka yang tidak banyak. Pada pengertian kedua ini lah dapat dijadikan dasar penilaian sebuah negara demokrasi atau tidak, alih-alih dalam pengertian pertama.⁴²

Parameter kedua adalah gagasan terkait rakyat dalam pengertian "*demos*" yang di dipersempit pemaknaanya, sehingga terjadi pengdiskriminasian terhadap rakyat jelata dengan orang-orang tertentu.⁴³ Dalam parameter kedua ini Taylor menerangkan bahwa masyarakat yang demokratis memerlukan tiga hal, yaitu ikatan/identitas bersama, memerlukan solidaritas, dan kepercayaan. Ikatan/identitas bersama merupakan keterhubungan akan moralitas universal tentang demokrasi. Selanjutnya sikap solidaritas, yang artinya sikap saling membantu dari mereka yang berkecukupan kepada yang membutuhkan. Terakhir, kepercayaan yaitu sikap saling percaya, ketika kita berunding bersama, yang diutamakan adalah kebaikan umum. Di sisi lain, masyarakat harus menolak konsep dan perilaku hierarki inheren, pandangan dimana orang-orang tertentu perlu diprioritaskan dalam pelayanan publik yang

akhirnya membentuk spiral ke tepi jurang, dimana akan membentuk identitas-identitas tandingan, sebagai contoh "kami bukan kelompok mereka", "kami bukan orang jawa", "kami kaum minoritas", slogan kelompok-kelompok ini membentuk identitas mandiri yang kemudian saling bertentangan dengan kelompok lainnya, yang justru menghancurkan pandangan masyarakat.⁴⁴

Parameter ketiga, yaitu ketika demokrasi disalahartikan sebagai aturan mayoritas, sehingga demokrasi ditafsirkan sebagai pemerintahan mayoritas, dalam artian mayoritas gerakan seperti "kelompok pengusaha" dan tidak memperlakukan yang lain sebagai warga negara.⁴⁵ Ketiga kemunduran ini tampak nyata di berbagai negara dan menyuburkan bentuk populisme yang mendefinisikan kaum populis sebagai kaum yang sempit, sehingga terjadi kesewenang-wenangan terhadap orang-orang diluar kelompok tertentu. Sedangkan, demokrasi sejati dalam pengertian yang sesungguhnya merupakan komunitas yang bermusyawarah dan memiliki rasa saling mengakui yang membentuk ruang-ruang diskusi yang saling menghormati untuk membentuk kesimpulan umum.⁴⁶ Menanggapi ketiga parameter tersebut, Taylor lebih jauh mengingatkan bahwa demokrasi sebagai konsep telik, yaitu pemerintahan yang *te/os*, dimana semua orang diperhitungkan, pada batasnya, secara setara. Tidak ada ketidakseimbangan di mana elit memiliki kekuatan untuk menutup pengaruh dan isu-isu yang

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.* hlm. 5.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 6-7.

⁴⁵ *Ibid.* hlm 8.

⁴⁶ *Ibid.*

munculkan dari kaum non-elit. Konsep telik harus terbuka bagi anggota non-elit dan elit.⁴⁷

Three Easy Paths to Resgression dapat dijelaskan seperti ini, jalan menuju regresi yang pertama adalah mempertegas ketimpangan, yaitu jalur menuju kemunduran melalui peningkatan ketimpangan. ciri-cirinya adalah ketimpangan yang membentuk spiral-spiral dan memakan dirinya sendiri, orang-orang berhenti memilih dalam pemilu, meningkatnya politik uang dalam pemilu, terbentuknya kelompok-kelompok, seperti gender, feminis, dan lain sebagainya.⁴⁸ Jalan kedua menuju regresi adalah eksklusi, di mana muncul berbagai identitas kolektif yang eksklusif yang membuat sebagian kelompok-kelompok lainnya terpinggirkan. Ketidakpercayaan antar kelompok dalam masyarakat menghambat solidaritas dan partisipasi, sehingga memunculkan ketegangan sosial. Jalan ketiga adalah pemaknaan rakyat yang eksklusif, di mana demokrasi dipahami sebagai pemerintahan oleh kelompok tertentu yang mengecualikan orang lain, sehingga menciptakan polarisasi dan konflik dalam masyarakat. Dalam situasi ini, pemilih yang demokratis merupakan komunitas yang bermusyawarah, hidup bersama, dan saling peduli, sehingga kelompok yang bermusyawarah ini disebut "kaum luar" dari para elit, sehingga para elit akan menyerang, melemahkan "kaum luar" untuk tidak melakukan perubahan terhadap

demokrasi.⁴⁹ Untuk mengatasi tantangan ini, Taylor mengusulkan empat masalah besar yang harus diatasi. Pertama, perlunya kebijakan ekonomi yang baik untuk mengatasi ketimpangan dan memastikan perlindungan bagi masyarakat yang terpinggirkan. Kedua, melawan kebodohan dengan mendorong partisipasi politik yang lebih aktif dan terinformasi. Ketiga, pentingnya mengorganisir demokrasi di tingkat basis dengan membangun komunitas yang inklusif dan dialogis. Terakhir, menemukan bahasa yang tepat untuk berbicara dengan kelompok yang terpinggirkan agar dapat menciptakan jembatan komunikasi yang efektif.⁵⁰

Selain ketiga jalan kemunduran tersebut, Larry Diamond menjelaskan bahwa dunia telah memasuki fase stagnasi dan kemunduran demokrasi. Kemunduran ini diistilahkan Diamond dengan kata "resesi demokrasi" yang menggambarkan penurunan yang halus namun terus-menerus dalam nilai-nilai dan institusi demokratis.⁵¹ Alih-alih menyaksikan kenaikan berkelanjutan dalam demokrasi, kita kini menghadapi periode di mana jumlah demokrasi elektoral telah mencapai titik jenuh, dan tingkat kebebasan rata-rata mulai menurun. Hal ini terjadi karena penurunan kebebasan dan aturan hukum. Selain itu, terjadi kebangkitan otoritarianisme di banyak negara, di mana pemimpin semakin mengekang kebebasan sipil dan hak politik. Untuk menghadapi permasalahan ini Diamond menyerukan

⁴⁷ Charles Taylor, "Democratic Degeneration: Three Easy Paths To Regression" (University of Chicago, Neubauer Collegium for Culture and Society, March 26, 2018). hlm 6-7.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 9-13.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 14-15.

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 16-20.

⁵¹ Larry Diamond, "Facing Up To The Democratic Recession," *Journal of Democracy* 26, no. 1 (January 2015). hlm. 141-154

solidaritas internasional dalam mempromosikan demokrasi dan menekankan perlunya reformasi yang memperkuat institusi demokratis, dengan mendorong partisipasi publik yang lebih besar, perbaikan dalam pemerintahan, dan dukungan untuk gerakan pro-demokrasi.⁵²

3. Tantangan dan Peluang Bagi Mahasiswa dalam Menghadapi *Three Easy Paths to Regression*

Pertama dalam menghadapi kemunduran dalam hal melawan ketimpangan dan terbentuknya spiral-spiral yang memakan dirinya sendiri, mahasiswa dapat berperan sebagai penggerak dialog dan diskusi kritis di kampus. Mahasiswa dapat membentuk ruang-ruang publik yang musyawarah, jaminan ini dilindungi oleh Konstitusi, DUHAM, ICCPR, dan serta berbagai undang-undang, seperti UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum termasuk berdemonstrasi. Selain itu, sebagai hak asasi manusia, kebebasan ini juga dilindungi dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi wajib dilindungi dari tindakan sewenang-wenang aparat keamanan negara. Kedua, mahasiswa juga dapat berperan dalam mempromosikan inklusivitas dan keberagaman. mengemukakan bahwa pengakuan terhadap keberagaman adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Dengan aktif terlibat dalam organisasi yang mendukung hak-hak minoritas dan kelompok terpinggirkan,

mahasiswa dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, yang pada gilirannya dapat mencegah regresi sosial. Ketiga, mahasiswa perlu mengembangkan pemikiran kritis dan analitis, di mana berpikir kritis adalah alat penting dalam menghadapi tantangan kompleks di masyarakat. Dengan mempelajari berbagai disiplin ilmu dan berlatih berpikir kritis, mahasiswa dapat lebih siap untuk menganalisis isu-isu sosial dan politik yang dihadapi, serta mengusulkan solusi yang konstruktif. Selain itu, mahasiswa juga dapat berperan memberikan masukan dan saran kepada para pembuat kebijakan seperti DPR, DPRD, DPD, dan lain sebagainya sebagai amanat partisipasi publik dalam membuat kebijakan.

Dengan demikian, dalam menghadapi *Three Easy Paths to Regression*, mahasiswa memiliki peran yang sangat strategis. Dengan menjadi agen perubahan, mereka dapat mendorong dialog, mempromosikan inklusivitas, terlibat dalam aksi sosial, mengembangkan pemikiran kritis, dan menjembatani generasi. Melalui upaya ini, mahasiswa tidak hanya berkontribusi pada perkembangan diri mereka sendiri, tetapi juga pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan, sesuai dengan pandangan Charles Taylor tentang pentingnya identitas dan nilai dalam konteks sosial yang lebih luas.

D. PENUTUP

Mahasiswa dan kemokrasi merupakan dua hal yang sangat erat dan melekat, dimana mahasiswa selain sebagai agen perubahan (*agent of changes*), mahasiswa juga memiliki beberapa fungsi lainnya, seperti penjaga nilai (*iron stock*), kontrol

⁵² *Ibid.*

sosial (*social control*), penggerak pembaharuan moral masyarakat (*moral force*), penjaga nilai-nilai luhur seperti musyawarah mufakat, pancasila, gotong royong (*guardian of value*). Peran ini dapat di telisik sejak era orde lama, dimana mahasiswa mampu menumbangkan pemerintahan Sukarno dengan demokrasi terpimpinnya, orde baru dengan otoriternya, hingga hari ini pasca reformasi, sebut saja tagar Indonesia gelap baru-baru ini. Dengan fakta Sejarah ini, maka mahasiswa menjadi nyawa dalam menjaga nilai-nilai universal dalam demokrasi.

Temuan menarik dari fakta ini adalah, setiap era ternyata memiliki tantangannya sendiri, dimana pada masa orde lama, dimulai dengan tumbuhnya gerakan-gerakan mahasiswa, seperti GMI, HMI, PMKRI, dan lain sebagainya. Kebebasan berpendapat pada masa itu tumbuh dengan nuansa akademik serta ideologi-ideologi yang berkembang. Tantangan mulai hadir pada akhir kepemimpinan Presiden Sukarno, dimana gerakan mahasiswa saat ini terpecah, dimana beberapa organisasi dipandang dekat dengan kekuasaan dan kebebasan berekspresi mulai di batasi dengan ideologi yang dekat dengan pemerintah. Namun, gerakan mahasiswa mampu membawa opini publik, yang berakhir dengan demonstrasi menggulingkan pemerintahan. Pada masa orde baru, merupakan masa yang cukup suram, dimana terjadi pembatasan gerakan dan kebebasan mahasiswa dimana-mana, hal ini dapat di Analisa dengan kebijakan NKK/BKK dan Peristiwa MALARI. Kekuatan otoriter dari pemerintah, memaksa angkatan darat mulai memasuki kampus,

penghilangan paksa terhadap mahasiswa, hingga pada akhirnya beberapa tuntutan dari mahasiswa lah yang mampu meruntuhkan pemerintahan orde baru. Pada masa saat ini, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi sudah mulai di lindungi, namun mahasiswa tetap memiliki peluang dalam menghadapi kebijakan pemerintah. Tantangan saat ini bukan lagi soal kekerasan fisik, namun pengaruh media yang membuat gerakan menjadi disinformasi. Selain itu, tantangan yang bersifat eksternal pada masa-masa sebelumnya ditambah dengan masalah internal mahasiswa sendiri, dimana tantangan membawa kepada pemikiran mahasiswa dan sikap kritis yang konsisten, serta menghadapi ancaman dari dalam kampus.

Tiga jalan kemunduran demokrasi yang disampaikan oleh Charles Taylor serta di dukung oleh para pakar dan penelitian lainnya, memberikan fakta bahwa dalam beberapa tahun ke belakang, nyatanya demokrasi tidak bergerak maju, justru menjadi semakin stagnan dan cenderung mundur, hal ini dapat dilihat dari tiga parameter yaitu, ke arah kontrol elit, penyempitan definisi rakyat, dan salah menafsirkan kekuasaan mayoritas, sehingga mayoritas yang dimenangkan oleh pemilu bertindak sewenang-wenang dan merasa dirinya sudah menang karena memegang suara mayoritas. Dari ketiga parameter itu menimbulkan tiga jalan kemunduran/regresi demokrasi yaitu pertama adalah mempertegas ketimpangan, yaitu jalur menuju kemunduran melalui peningkatan ketimpangan dengan membentuk spiral-spiral yang memakan dirinya sendiri. Jalan

kedua adalah eksklusi, di mana muncul berbagai identitas kolektif yang eksklusif yang membuat sebagian kelompok-kelompok lainnya terpinggirkan, sehingga menghambat solidaritas dan partisipasi dan menciptakan polarisasi dalam masyarakat. Dan jalur ketiga adalah mendefinisikan agar rakyat melawan “kaum luar” yang mengedepankan musyawarah dalam berdemokrasi dan penghasutan serta penyerangan terhadapnya.

Terhadap ketiga jalur tersebut, maka disinilah sebutulnya peluang bagi mahasiswa, dimana mahasiswa yang mampu berfikir kritis harus hadir dalam melawan para elit tersebut. Pertama, mahasiswa dapat berperan sebagai penggerak dialog dan diskusi kritis di kampus. Mahasiswa dapat membentuk ruang-ruang publik yang musyawarah, jaminan ini dilindungi oleh Konstitusi, DUHAM, ICCPR, dan serta berbagai undang-undang. Kedua, mempromosikan inklusivitas dan keberagaman. mengemukakan bahwa pengakuan terhadap keberagaman adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis dengan ikut ambil bagian dalam berorganisasi. Ketiga, mengembangkan pemikiran kritis dan analitis sebagai kunci membangun kesadaran kolektif yang lebih kuat dan mencegah regresi nilai-nilai sosial dengan cara mengkritisi kebijakan pemerintah, bahkan hingga berdemonstrasi hingga menumbangkan pemerintahan sebagaimana fakta sejarah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Nugroho. *Partisipasi Politik Generasi Muda Di Era Digital*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Charles Taylor. *Democratic Degeneration: Three Easy Paths to Regression*. Chicago: University of Chicago, 2018.
- . “Democratic Degeneration: Three Easy Paths To Regression.” March 26, 2018.
- . “The Challenge of Regressive Democracy.” October 12, 2017.
- Dyah Ochterina Susanti, A’an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014.
- Everett M. Rogers. *Diffusion of Innovations*. New York: Free Press, 2003.
- Habermas, Jürgen. *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Translated by Thomas Burger. The MIT Press, 1991.
- Larry Diamond. *The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World*. New York: Times Books, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

- Pippa Norris. *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011
- Ramlan Surbakti. *Perekayasaan Sistem Pemilu: Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Jakarta Harper Perennial, 2008
- Robert A. Dahl. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press, 1989.
- , *On Democracy*. New Haven & London: Yale University Press, 1998.
- B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian**
- Amartya Kumar Sen. "Democracy as a Universal Value." *Journal of Democracy*. Vol. 10, No. 3 (1999).
- Amnesty International. "Annual Report 2020/2021: The State of the World's Human Rights." London, 2021.
- Asian Network for Free Elections (ANFREL). "Election Observation Report: Challenges and Threats in Southeast Asia." Bangkok, 2021.
- Bob Sugeng Hadiwinata. "Democracy and Civil Society in Indonesia: The Role of Students in the Reform Movement." *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*. Vol. 3, No. 1 (2004): 45–60.
- Elis Mardianti. "Gerakan Mahasiswa Dalam Pusaran Tiga Orde Kekuasaan: Antara Gerakan Moralitas Atau Gerakan Politis." *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*. Vol. 2, No. 2 (2022).
- Freedom House. *Freedom in The World 2023: Marking 50 Years in the Struggle for Democracy*. Washington: Freedom House, 2023.
- Larry Diamond. "Facing Up To The Democratic Recession." *Journal of Democracy*. Vol. 26, No. 1 (January 2015).
- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). "Laporan Pemantauan Pemilu 2019." Jakarta, 2019.
- Mahi M. Hkikmat. "Urgensi Partisipasi Gerakan Sosial Mahasiswa Dalam Peningkatan Kualitas Pemilu 2024." *Jurnal Keadilan Pemilu*. Vol. 1, No. 1 (2021).
- Maiwan, Mohammad. "Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Lama: Suatu Perspektif Historis." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*. Vol. 14, No. 2 (2015).
- Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman. "Pernyataan Sikap PPI Jerman; Tuntutan Pelajar Indonesia Di Jerman Atas Kerusakan Sistematis Negara Dan Krisis Multidimensional Di Indonesia." Koln, Germany, 2025.
- Rahayu Hardita Dwi Widyanti, Yusuf Budi Prasetya, Irfan Ahmad Fauzi. "Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Baru 1974-1978: Dari MALARI Hingga NKK/BKK." *Journal Chronologia*. Vol. 4, No. 3 (2023).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Universal Declaration of Human Rights

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.